



Feminisme sebagai Kritik Kapitalisme: Memperkenalkan Teori Kritis Nancy Fraser

Amin Mudzakkir

Pusat Riset Kewilayahan-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRW-BRIN)
pos-el: amin008@brin.ac.id

Diajukan: 16/06/2021; Direview: 21/10/2021; Diterima: 02/11/2021; Dipublis: 23/12/2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v20i2.234.235-257>

Abstract: *This article is an overview of the intellectual and historical background of Nancy Fraser's thought. Intellectually, Fraser is a socialist feminist and critical theorist of the Frankfurt school who sought to reconnect gender analysis and the critique of capitalism. According to Fraser, the shift from state-managed-capitalism to neoliberal capitalism is the historical context that separates gender analysis and capitalism criticism in such a way that feminism is trapped as a handmaiden of neoliberalism. Based on an examination of Fraser's works and related literature, this article shows the problems of feminism in the neoliberal era and Fraser's critical theory offers to reclaim it.*

Key words: socialist feminism, critical theory, the Frankfurt School, gender, capitalism.

Pendahuluan

Tulisan ini akan memperkenalkan Nancy Fraser. Meski pertama-tama dikenal sebagai feminis, latar belakang pemikiran yang mendasari Fraser sangat kompleks, sekompleks feminisme itu sendiri. Dalam feminisme, keterlibatan Fraser merupakan dialektika yang berjalan melalui tahapan-tahapan historis tertentu. Sejak dekade 1980-an, Fraser terlibat dialog kritis dengan sejumlah arus intelektual dan kecenderungan politik yang mengelilinginya. Dalam hal ini, pokok perhatian Fraser sangat konsisten, yaitu bagaimana agar feminisme menjadi kritik kapitalisme. Oleh karena itu, tidak heran jika belakangan dia semakin keras melancarkan kritik terhadap perkembangan feminisme kontemporer yang dinilainya melenceng dari tujuan awalnya. Dalam sebuah artikel, Fraser menyebut feminisme saat ini saat justru menjadi “pelayan” neoliberalisme.¹

Kritik Fraser memang tidak berlebihan. Terutama sejak dekade 1980-an, feminisme dihadapkan pada suatu dilema. Dalam konteks Amerika Serikat, dilema itu mengemuka dalam apa yang oleh Fraser disebut “multikulturalisme” versus “kesetaraan gender”.² Yang pertama mengacu pada perubahan politik rekognisi yang menguat, sedangkan yang kedua merupakan kelanjutan dari politik redistribusi yang melemah. Dilema ini menghadirkan tidak hanya feminisme, tetapi juga gerakan sosial lainnya pada dua tantangan sekaligus, yaitu penguatan politik identitas di satu sisi dan pelebaran ketimpangan sosial di sisi yang lain. Tentu saja perempuan adalah salah satu kelompok yang

¹Nancy Fraser, “How feminism become capitalism’s handmaiden—and how to reclaim it”, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal>, diakses 10 Maret 2021.

²Nancy Fraser, “Multiculturalism and Gender Equity: The U.S. “Difference” Debates Revisited”, *Constellations*, Volume 3, No 1, 1996, hlm. 61-72.

paling terdampak. Carol Barton, koordinator The Women's International Coalition for Economic Justice (WICEJ) pada pertemuan World Social Forum di Porto Alegre, Brazil, Januari 2003, meng gambarkannya demikian,

Perempuan sedang dikelilingi oleh dua kekuatan: salah satunya adalah dorongan globalisasi korporasi yang dikuasai oleh gagasan “fundamentalis” bahwa hanya ada satu model ekonomi bagi dunia, yaitu “pasar bebas” dan liberalisasi perdagangan. Yang lain adalah fundamentalisme agama dan etnis, yang sebagiannya diperburuk oleh dislokasi yang disebabkan neoliberalisme. Kedua kekuatan ini menghancurkan perempuan, menimbulkan penderitaan baik karena kehilangan mata pencaharian atau keamanan ekonomi, dan kehilangan upaya untuk menegaskan kembali kontrol atas pilihan hidup dan tubuh mereka. Baik pada tataran internasional dan nasional, kekuatan-kekuatan ini mendorong penghancuran hak perempuan untuk menentukan hak seksual dan reproduksi agenda, ekspresi hak seksual dan hak reproduksi, dan akses ke sumber daya yang menjamin pilihan hidup yang mengarah ke kesehatan reproduksi dan kesejahteraan mereka.³

Dilema yang dihadapi oleh feminisme adalah akibat yang tidak terantisipasi dari perkembangan kapitalisme. Jarang disadari bahwa kritik feminisme terhadap praktik negara kesejahteraan yang bias gender di era kapitalisme yang dikelola negara, misalnya, justru menjadi legitimasi bagi kapitalisme neoliberal. Pokok ini yang mau diingatkan oleh Fraser. Menggunakan sebuah istilah “resignifikasi” yang digunakan oleh Judith Butler, dia memperlihatkan bagaimana kritik feminis dimanfaatkan ulang oleh kapitalisme dengan visi dan tujuan yang berbeda sama sekali. “Praktik-praktik yang kusut” (*unruly practices*) ini merupakan sesuatu yang tak terhindarkan jika kita memahami “spirit baru kapitalisme”.⁴ Demikian Fraser berargumen berdasarkan bacaannya terhadap Luc Boltanski dan Eve Chiapello.⁵ Karya dua sosiolog Perancis ini dianggap penting oleh Fraser dan berguna khususnya bagi para feminis karena memperlihatkan secara cermat dan tepat karakter evolutif dari kapitalisme yang memungkinkannya terus berubah mengikuti perkembangan zaman, termasuk mengadopsi berbagai kritik terhadapnya menjadi sumber legitimasi baru. Oleh karena itu, Fraser mengajak para sejawatnya untuk mereformulasi kritiknya di abad ini agar tetap mampu, mengutip kata-kata Karl Marx, menjadi “Klarifikasi diri perjuangan dan harapan zaman” (*the self-clarification of the struggles and wishes of the age*).⁶

Sebagaimana dikatakan di atas, pemikiran feminisme Fraser sangat kompleks. Namun tradisi teori tradisi teori kritis, khususnya yang terafiliasi dengan mazhab Frankfurt, bagaimanapun harus dilihat sebagai titik tolaknya yang utama. Bersama sejumlah feminis lainnya seperti Seyla Benhabib, Fraser mengembangkan suatu warna baru dalam lintasan sejarah teori kritis yang pada generasi

³ “Women are being hemmed in by two forces: One is the push for a corporate-led globalization with a “fundamentalist” notion that there is only one economic model for the world, that of the “free market” and trade liberalization. The other is that of religious and ethnic fundamentalism, aggravated in part from the dislocation caused by neo-liberalism. Both of these forces are devastating to women, who suffer both the loss of livelihoods and economic security, and the efforts to reassert control over their life choices and their bodies. Both internationally and nationally, these forces are pushing hard to dismantle women’s hard-won rights to define a sexual rights and reproductive agenda, to express their sexual and reproductive rights, and to have access to resources that assure life choices leading to reproductive health and well-being”, Carol Barton, “Global Women’s Movements at a Crossroads: Seeking Definition, New Alliances and Greater Impact”, *Socialism and Democracy*, Vol. 18, No. 1, 2004, hlm. 153-154.

⁴ Istilah yang digunakan oleh Fraser sendiri dalam menjelaskan relasi rumit antara gender dan kekuasaan di era modern. Lihat Nancy Fraser, *Unruly Practice: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory* (The Minesota University Press, 1989)

⁵ Luc Boltanski dan Eve Chiapello, *The New Spirit of Capitalism* (London/New York: Verso, 2005).

⁶ Menurut Fraser, kalimat terakhir ini adalah pengertian Teori Kritis yang merujuk pada tulisan Marx 1843. Dikutip dalam Nancy Fraser, *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis* (London/New York: Verso, 2013), hlm. 19.

terdahulu yang dikenal lebih bercorak “klub laki-laki”.⁷ Tentu saja Horkheimer, Adorno, dan terutama Habermas telah menunjukkan perhatian terhadap masalah gender dan feminisme, tetapi keterlibatan Fraser serta sejumlah pemikir perempuan lainnya dalam mazhab ini memberi bobot tersendiri yang menarik untuk dikaji. Sebagian besar pemikirannya bertolak dari, sekaligus kritik terhadap, Habermas. Dapat dikatakan pemikiran Fraser merupakan usaha untuk lebih mendekatkan Habermas dan feminisme. Menurutnya, meski masih menyisakan warisan androginis, sejumlah kerangka teori Habermas bisa membantu kalangan feminis untuk memahami berbagai lapisan realitas masyarakat kapitalis.⁸

Dalam melakukan kritik, Fraser menempatkannya pada lintasan historis tertentu. Historisasi kapitalisme menjadi salah satu kata kunci dalam proyek kritiknya. Kritik kapitalisme harus mengacu pada konteks yang spesifik. Ketidakmampuan sebagian feminis dalam memahami kapitalisme dalam konteks sejarah tertentu adalah penyebab mengapa perjuangan mereka di era neoliberal terlihat tidak berdaya. Dalam hal ini, mengikuti konvensi yang berlaku dalam sejarah masyarakat Barat, Fraser membagi babakan kapitalisme menjadi tiga, yaitu kapitalisme liberal, kapitalisme yang dikelola oleh negara, dan kapitalisme finansial atau neoliberal. Masing-masing babakan mempunyai karakternya sendiri yang jika tidak dipahami secara cermat dan tepat akan menimbulkan dilema, seperti dialami oleh gerakan feminis saat ini.⁹

Tulisan ini akan menguraikan pembahasannya melalui sistematika berikut. Setelah bagian pengantar ini, suatu tinjauan umum mengenai feminisme dan di mana tempat Fraser di sana akan dikemukakan. Lalu selanjutnya, pembahasan masuk ke dalam perbincangan teori kritis dan apa peranan Fraser di sana. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam pemaparan Fraser mengenai ambivalensi feminisme gelombang kedua yang akan dibagi ke dalam tiga babakan historis mengikuti pembagian Fraser sendiri. Bagian akhir adalah rangkuman.

Feminisme

Di awal telah dikatakan bahwa Fraser mengkritik feminisme saat ini karena dianggap merupakan pelayan neoliberalisme.¹⁰ Pertanyaannya, feminisme yang mana? Bukankah feminisme terdiri dari beragam aliran yang terkadang satu dengan yang lain saling bertentangan? Apakah semua aliran feminisme adalah pelayan neoliberalisme? Lalu, kalau demikian halnya, mengikuti keinginan Fraser, apa yang masih bisa diperjuangkan dari dalam feminisme sebagai kritik kapitalisme?

Dapat dipastikan bahwa yang dimaksud oleh Fraser sebagai pelayan neoliberalisme adalah feminisme neoliberal.¹¹ Menurut Rottenberg, berbeda dengan sebagian sejumlah feminisme liberal yang masih menuntut peran negara dalam memberi jaminan bagi kebebasan perempuan, feminisme

⁷ Istilah ini diambil dari sebuah program di suatu lembaga think tank terkemuka AS yang menawarkan kursus tentang feminisme dan teori kritis, lihat <https://thebrooklyninstitute.com/items/courses/new-york/feminism-frankfurt-school/>, diakses 10 Maret 2021.

⁸ Nancy Fraser, *The Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis* (Londo/New York: Verso), hlm. 19-51. Buku suntingan Johanna Meehan, *Feminist Read Habermas: Gendering the Subject of Discourse* (New York/London: Routledge, 1995) membahas topik ini secara khusus.

⁹ Fraser, *The Fortune of Feminism*, hlm. 209.

¹⁰ Nancy Fraser, “How feminism become capitalism’s handmaiden—and how to reclaim itu”, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal>

¹¹ Fraser menganggap feminisme neoliberal sesungguhnya hanya merefleksikan pandangan dan kepentingan dari “1 %” populasi. Tentu ini adalah retorika, tetapi maksud Fraser adalah bahwa di luar feminisme neoliberal terdapat varian feminisme lainnya yang lebih mencerminkan suara keprihatinan perempuan secara lebih luas. Dalam “sebuah manifesto” yang ditulis bersama rekan-rekannya, suara itu adalah “feminisme untuk 99 %”, yaitu feminisme anti-kapitalis yang berjuang untuk keadilan sosial. Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, dan Nancy Fraser, *Feminism for 99 %: A Manifesto* (London/New York, 2019)

neoliberal membebankan sepenuhnya tuntutan tersebut pada individu semata.¹² Yang ditekankan oleh mereka bukan lagi perjuangan sosial, melainkan pencapaian kesuksesan personal. Memang mereka menyuarakan pembelaan terhadap keberagaman, politik rekognisi terhadap kalangan LGBTQ (*lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and questioning*), bahkan anti-rasisme, tetapi suara mereka terlepas dari masalah ketimpangan sosial di masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks Amerika Serikat, feminisme neoliberal mengacu pada sejumlah figur publik yang sedemikian rupa mengaku dirinya sebagai feminis. Sosok yang paling terkenal tentu saja adalah Hillary Clinton. Istri Presiden Clinton yang kemudian maju menjadi calon presiden dari partai Demokrat pada pemilihan umum Amerika Serikat 2016 ini dipandang sebagai representasi terbaik feminisme neoliberal. Sosok lainnya adalah COO (*Chief Operating Officer*) Facebook, Sheryl Sandberg, yang menulis sebuah buku yang sangat laris, *Lean In*¹³. Buku ini, meski lebih merupakan testimoni personal penulisnya dalam meraih posisi penting di korporasi, mengklaim dirinya sebagai suara feminisme dan mengutip sejumlah teori feminisme, khususnya dari sayap liberal, untuk menambah bobotnya. Feminisme neoliberal ini, alih-alih berpusat di akademik, memang lebih berbasis pada figur-figur dan media-media populer. Termasuk dalam hal ini adalah artis terkenal Beyonce yang menyatakan dirinya feminis dan memperjuangkan visi feminisme.¹⁴

Akan tetapi, meski menyuarakan pembelaan terhadap keberagaman, suatu politik rekognisi terhadap kalangan LGBTQ, dan bahkan anti-rasisme, Fraser menyatakan tidak ada yang perlu ditangani dari kekalahan Hillary di pemilihan umum Amerika Serikat 2016.¹⁵ Menurutnya, Hillary mewakili apa yang disebutnya sayap progresif dari neoliberalisme. Dari sisi kultural, politik rekognisi, mereka memang bisa diandalkan. Pembelaan mereka terhadap kelompok minoritas kultural dan orientasi homoseksual cukup kelihatan. Namun dari sisi ekonomi, politik redistribusi, mereka justru memperkuat neoliberalisme. Penekanan yang berlebihan pada aspek kebebasan dan kesuksesan individual memberi jalan bagi penguatan rasionalitas pasar bebas, sehingga bagi mereka kesetaraan adalah sama dengan meritokrasi. Kenyataannya, pengurangan program kesejahteraan yang ditawarkan oleh Hillary, yang sejatinya pernah dijalankan oleh pemerintahan di masa suaminya Clinton (1992-2001) dan lalu diteruskan oleh Obama (2009-2017), berdampak negatif terhadap kondisi kehidupan para pekerja, termasuk para pekerja perempuan. Bagi Fraser, cakupan dari perjuangan feminisme sebagaimana disuarakan oleh Hillary tetap terbatas, yaitu perempuan profesional dan terpelajar yang menempati kelas menengah atau kelas atas masyarakat kapitalis. Demikian pula dari sisi geopolitik. Target perjuangan mereka adalah perempuan di negara-negara Utara yang kaya, sementara perempuan di negara-negara Selatan yang miskin hanya dilihat sebagai sumber pemasok tenaga kerja murah lewat migrasi dan mobilitas global lainnya.¹⁶

Masalahnya, reaksi terhadap model feminisme neoliberal progresif tersebut tidak hanya tidak memuaskan, tetapi dalam banyak hal justru mengalami kemunduran. Reaksi yang dimaksud oleh Fraser adalah suara-suara mengenai gender dan feminisme yang menumpang arus populisme kanan yang diwakili secara sempurna oleh sosok Donald Trump. Kemenangan Trump terhadap Hillary pada 2016 memperlihatkan adanya serangan balik dari kaum konservatif terhadap wacana progresif yang disuarakan oleh Hillary dan para pendukungnya. Masih dalam konteks Amerika Serikat, mereka yang umumnya berkumpul di bawah bendera Partai Republik itu menyuarakan pandangan yang sesungguhnya bersifat anti-feminisme. Mereka menyerukan pentingnya kembali nilai-nilai keluarga berdasarkan agama, dalam hal ini Kristen evangelis, yang berpusat pada pembagian peran kaku antara

¹² Catherine Rottenberg, *The Rise of Neoliberal Feminism* (New York: Oxford University Press, 2018)

¹³ Sheryl Sandberg, *Lean In: Women, Work, and the Will to Lead* (New York: Alfred A. Knopf, 2013)

¹⁴ Catherine Rottenberg, *The Rise of Neoliberal Feminism*, hlm. 10-11.

¹⁵ Nancy Fraser, "The End of Progressive Neoliberalism",

https://www.dissentmagazine.org/online_articles/progressive-neoliberalism-reactionary-populism-nancy-fraser, diakses 2 Mei 2020.

¹⁶ Nancy Fraser, "Contradictions of Capital and Care", *New Left Review*, No. 10, 2016, hlm. 112.

suami pencari nafkah dan istri pengurus rumah. Oleh Fraser, mereka disebut sebagai sayap reaksioner dari neoliberal. Berkebalikan dengan sayap progresif, sayap reaksioner ini lebih parah karena, selain sama-sama berorientasi neoliberal, mereka anti-keberagaman, anti-imigran, rasis, sehingga jelas anti-politik rekognisi.¹⁷

Tentu feminisme neoliberal tidak hadir begitu saja. Pada dasarnya ia bersandar pada sejumlah argumen feminisme sebelumnya, khususnya feminisme liberal.¹⁸ Menurut Baehr, mereka terbagi setidaknya ke dalam dua kubu, yaitu feminisme liberal klasik dan feminisme liberal egalitarian.¹⁹ Feminisme liberal klasik, seperti namanya, merujuk pada gagasan para feminis awal, seperti Mary Wollstonecraft yang menulis sebuah buku penting di akhir abad ke-18.²⁰ Sejak era itu, feminisme liberal telah berperan penting bagi proyek pembebasan perempuan, terutama di bidang pendidikan dan politik.²¹ Pusat kelahirannya adalah Eropa, yaitu di Inggris dan Prancis, lalu menyebrang ke Amerika Serikat. Dalam hal ini tentu saja mereka mendapatkan asupan pengetahuan dari liberalisme seperti John Stuart Mill. Sejak kelahirannya, mereka mempertanyakan berbagai manifestasi sistem patriarki yang menurut Hodgson-Wright mengacu “hubungan kekuatan di mana kepentingan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki”. Hubungan kekuatan ini memiliki banyak bentuk mulai dari penggolongan pekerjaan menurut jenis kelamin dan pemberdayaan dalam organisasi sosial hingga norma femininitas yang diinternalisasikan dalam kehidupan kita.²² Dalam kelompok feminisme liberal klasik belakangan berkembang sayap libertarian kultural yang “peduli terhadap kendala kebebasan individu dari pemerintah serta dari lembaga keluarga, agama, dan komunitas tradisional — lembaga sipil yang sama yang dianggap perlu oleh kaum konservatif agar kebebasan yang teratur dapat berkembang”.²³

¹⁷ Nanc Fraser, *The Old Is Dying and the New Cannot Born* (London/New York: Routledge, 2019), hlm. 16.

¹⁸ Memang di antara varian feminisme yang sangat beragam, feminisme liberal adalah yang pertama dan yang paling berpengaruh, sehingga varian feminisme lainnya pada dasarnya adalah respons terhadapnya. Rosemarie Putnam Thong, *Feminist Thought* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), hlm. 2. Sementara itu, meski kata *feminism* baru ditemukan pertama kali dalam literatur bahasa Inggris pada tahun 1880, akar-akar gerakan perempuan telah muncul sejak abad ke-15. Menurutnya, pada abad itu seorang perempuan Italia bernama Christine de Pisan telah menulis sebuah catatan tentang hak dan kewajiban seksual perempuan. Catatan de Pisan ini sangat berpengaruh, termasuk terhadap perdebatan mengenai posisi perempuan di Inggris pada akhir abad ke-17. Lhat, Valerie Bryson, *Feminist Political Theory* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 5.

¹⁹ Baehr, Amy R., "Liberal Feminism", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/feminism-liberal/>>

²⁰ Pada tahun 1792, Mary Wollstonecraft menerbitkan *Vindication Right of Women* yang dianggap merupakan tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan. Buku ini merupakan “karya pertama yang secara terang-terangan berteriak kepada perempuan kelas menengah, khususnya para ibu, sebagai kelas yang paling berpengaruh dalam masyarakat”. Dalam ungkapan Miriam Kramnick, “...Perempuan ideal yang digambarkan dalam *Vindication* adalah perempuan yang aktif dan cerdas, perpaduan antara tanggung jawab kenegaraan dan keluarga, terbebas dari pekerjaan yang membosankan dan merendahkan derajat”. Singkat kata, buku Wollstonecraft “menyerukan sebuah revolusi dalam tindakan” yang menyarankan agar sekolah-sekolah menyediakan waktu yang bersamaan bagi laki-laki dan perempuan biar mereka mempunyai manfaat dididik bersama. Dikutip dalam Valerie Sanders, “Gerakan Feminisme Gelombang Pertama” dalam Sarah Gamble, *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme* (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 20-21.

²¹ Feminisme liberal sendiri menekankan dua hal pokok, yaitu keadilan gender menuntut kita membuat aturan permainan yang adil dan, kebalikannya, keadilan gender tidak menuntut kita untuk memberikan hadiah bagi yang menang dan yang kalah agar tidak satu pun dari mereka yang berkompetisi dalam kebaikan dan pelayanan masyarakat dirugikan secara sistematis. Untuk mencapai itu, perempuan harus dibebaskan untuk mengikuti pendidikan dan kemudian untuk memilih wakil mereka di pemerintahan. Dua pokok ini, pendidikan dan politik, adalah isu utama yang diperjuangkan feminis liberal selama gelombang pertama gerakannya Stephanie Hodgson-Wright, “Feminisme Periode Awal” dalam Sarah Gamble, *Pengantar Memahami feminisme & Postfeminisme*, hlm 3-4.

²² Stephanie Hodgson-Wright, “Feminisme Periode Awal” dalam Sarah Gamble, *Pengantar Memahami feminisme & Postfeminisme*, hlm 3-4.

²³ “concerned about constraints on individual freedom from government as well as from traditionalist familial, religious, and community institutions—the same civil institutions that conservatives see as necessary for ordered

Sementara itu, feminisme liberal egalitarian, meski muncul belakangan, bergerak lebih luas lagi. Terinspirasi oleh pemikiran filsuf liberal egalitarian seperti John Rawls, mereka bergabung dengan kelompok-kelompok lain, termasuk kaum kiri, dalam memperjuangkan keadilan yang lebih luas. Tentu saja fokus mereka adalah kesetaraan, tetapi mereka berpikir lebih struktural dengan melibatkan peran serta institusi negara dan masyarakat sipil, bukan hanya perjuangan individual.²⁴ Suara feminisme liberal egalitarian ini cukup nyaring terdengar bersamaan dengan kebangkitan kaum Kiri Baru di kampus-kampus di Amerika Serikat dan Eropa. Kiri baru adalah “generasi baru yang resah” terhadap pencapaian perkembangan ekonomi pasca-Perang. Mereka menilai kapitalisme telah melahirkan masyarakat konsumsi yang dikuasai oleh “kesadaran palsu” yang mengabdikan kepada kepentingan industri dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka juga tidak puas dengan kritik atas kapitalisme yang hanya bekerja pada tataran teoretis. Namun berbeda dengan Marxisme yang mengharapkan perubahan struktur kekuasaan yang baru, Kiri Baru lebih berorientasi pada pembentukan kesadaran baru. Mereka bekerja berdasarkan prinsip anti-otoriter, termasuk dalam kehidupan seksual. Selain itu, mereka juga meremehkan kinerja demokrasi parlementer yang dianggap lamban. Pada tataran akademis, mereka melancarkan kritik tajam terhadap positivisme dan empirisme yang dianggap sebagai bagian dari ideologi kemapanan. Gerakan kiri baru disebut “kiri” karena berorientasi Marxisme dan sosialisme, lalu disebut “baru” karena mereka menolak sosialisme birokratis di negara-negara komunis dan reformisme partai-partai sosial demokrat di negara-negara Barat. Di Amerika Serikat, gerakan ini muncul bersamaan dengan gelombang hak sipil, protes anti-rasisme, dan anti-perang.²⁵

Pertanyaannya kemudian, dalam bayang-bayang kebangkitan feminisme neoliberal tersebut, posisi Fraser sendiri di mana? Orientasi politik dan intelektual awal Fraser tumbuh di akhir 1960-an ketika kelompok Kiri Baru bersemi di kampus-kampus, termasuk di Amerika Serikat. Tercatat sebagai mahasiswi di Bryn Mawr College, bersama sejumlah rekannya dia tergabung dalam *The Socialist Labor Committee* di New York. Seperti aktivis pada masa itu, mereka membaca Marcuse tentang manusia satu dimensi.²⁶ Fraser sendiri sejak awal merasa orientasi utamanya adalah Marxist-Hegelian. Posisi ini membawanya ke kancah feminisme. Akan tetapi, pada saat yang sama Fraser berkenalan dengan Pragmatisme Rorty lewat Richard Bernstein. Dialektika pemikiran ini membawanya pada suatu sikap kritis terhadap post-strukturalisme Prancis yang menjadi topik disertasinya di State University of New York (SUNY) pada 1980. Terutama mengenai Foucault, Fraser berpendapat kontribusinya terhadap feminisme sangat besar, khususnya dalam menjelaskan apa itu kekuasaan, tetapi secara normatif lemah. Setelah lulus program doktoral, Fraser mulai berkarir di dunia akademis. Saat itu keberadaan perempuan di kampus, khususnya di departemen filsafat, sangat jarang, apalagi yang berorientasi pada feminisme sosialis. Situasi di Eropa dan Amerika Serikat berbeda. Di Amerika Serikat, kata Fraser, apalagi di era Perang Dingin, Marxisme memang tidak mendapatkan tempat. Seperti mengemuka dalam skandal McCarthyism pada dekade 1950-an, semua yang berbau kiri dianggap komunis dan itu artinya pro-Uni Soviet.²⁷

liberty to thrive”. Baehr, Amy R., “Liberal Feminism”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/feminism-liberal/>>. <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-liberal/#ClasLibeFemi>

²⁴ Baehr, Amy R., “Liberal Feminism”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/feminism-liberal/>>. <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-liberal/#ClasLibeFemi>

²⁵ Franz Magnis-Suseno, *Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin* (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 296-301.

²⁶ Yang dimaksud adalah buku terkenal Herbert Marcuse, *One Dimensional Man* (New York: Routledge, 2007 [1964])

²⁷ Patricia Mooney Nickel (ed.), *North American Critical Theory after Postmodernism: Contemporary Dialogues* (New York: PalgraveMacmillan, 2012), hlm. 155-172.

Berlatar belakang Kiri Baru itu, dapat dikatakan feminisme Fraser merupakan kombinasi yang kompleks di antara berbagai aliran pemikiran yang menopang fondasi intelektual gerakan tersebut. Dalam konteks gerakan feminisme sendiri, Fraser merupakan bagian dari gelombang kedua yang berkembang sejak 1960-an. Berbeda dengan gelombang pertama yang lebih terfokus pada reformasi sistem pendidikan dan politik, yang menjadi inti keprihatinan feminisme liberal klasik, gelombang kedua feminisme memperjuangkan keadilan sosial secara lebih luas. Selain berintikan elemen-elemen egalitarian dari feminisme liberal, gelombang kedua ini disokong juga oleh para feminis radikal dan terutama lagi feminis sosialis. Ada persamaan dan perbedaan di antara elemen gelombang kedua feminisme ini, tetapi pada dasarnya mereka tidak puas dengan gagasan feminisme liberal klasik yang dianggap hanya menyuarakan dan menjangkau kepentingan yang sangat terbatas. Kalangan feminis radikal tidak setuju dengan feminis liberal klasik karena bagi mereka sistem patriarki harus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Hal ini meliputi tidak hanya struktur hukum dan politik, tetapi juga lembaga-lembaga sosial dan kultural yang dinilai patriarkis. Oleh karena itu, lebih dari sekadar urusan gender, pokok permasalahan teori feminis menurut kelompok radikal adalah seksualitas.²⁸ Sementara itu, setuju dengan kalangan feminis radikal yang menolak pembedaan antara publik dan privat, kalangan feminis sosialis bergerak lebih jauh lagi dengan menempatkan logika pembagian kerja berdasarkan perbedaan seksual dalam dinamika kapitalisme. Dengan kata lain, bagi feminis sosialis, patriarki dan kapitalisme tidak bisa dipisahkan, keduanya membentuk “kapitalisme patriarkis”. Feminisme sosialis berusaha mempertemukan kritik feminisme radikal terhadap patriarki dan kritik feminisme Marxis terhadap kapitalisme. Keduanya dinilai sama pentingnya dan tidak bisa dipisahkan.²⁹

Pembahasan mengenai feminisme sosial membutuhkan penjelasan agak panjang karena Fraser sendiri selalu mengidentifikasi dirinya dengan kelompok ini. Feminisme sosialis berasal dari Marxisme. Oleh karena itu, seringkali feminisme sosialis disebut juga feminisme Marxist. Kedua istilah ini bisa dipertukarkan. Menurut Rosemarie Tong, perbedaan di antara keduanya lebih merupakan masalah penekanan daripada masalah substansi. Feminisme Marxis lebih menunjukkan penghargaan mereka secara langsung kepada Marx dan Engels dan pemikiran abad ke-19 lainnya, sedangkan feminisme sosialis lebih dipengaruhi oleh para pemikir abad ke-20 seperti Althusser dan Habermas. Meski demikian, kata Tong, keduanya percaya bahwa opresi terhadap perempuan bukanlah hasil tindakan sengaja dari satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial, dan ekonomi di mana individu itu berada.³⁰

Feminisme sosialis lahir dari suatu dinamika intelektual yang panjang. Jauh sebelum tahun 1960-an, Frederick Engels telah berusaha melihat masalah perempuan dari sudut pandang material. Bagi Engels, penindasan terhadap perempuan merupakan hal yang inheren dalam kapitalisme. Berangkat dari temuan antropologi Lewis Gordon, Engels dalam *The Origin of the Family, Private Property and the State* menguraikan proses alienasi perempuan dalam konteks historis tertentu. Pengaruh dari pandangan Engels terhadap feminis sosialis cukup mendalam. Setidaknya terdapat dua pokok yang tersampaikan. Pertama, keluarga dan hubungan seksual bukan perkara alamiah, melainkan dihasilkan oleh suatu situasi historis tertentu, sehingga di masa depan ia bisa diubah. Kedua, perubahan ini tidak dibawa oleh kapasitas nalar, melainkan oleh perubahan kondisi produksi. Engels menjelaskan demikian:

²⁸ Dalam hal ini terdapat dua golongan besar feminis radikal. Golongan pertama, feminisme radikal-libertarian, menyatakan bahwa tidak ada jenis pengalaman seksual yang spesifik yang bisa dinilai sebagai jenis pengalaman seksual yang terbaik bagi perempuan terbebaskan. Sebaliknya, golongan kedua, feminis radikal-kultural, berpendapat bahwa perempuan harus membebaskan diri dari kungkungan heteroseksualitas dengan menciptakan seksualitas perempuan yang eksklusif melalui selibat, oterotisme, atau lesbianisme. Tong, *Feminist Thought*, hlm. 4-5

²⁹ Tong, *Feminist Thought*, hlm. 5-6.

³⁰ Tong, *Feminist Thought*, hlm. 139.

Menurut konsepsi materialis, faktor yang menentukan dalam sejarah adalah, dalam ihwal terakhir, produksi dan reproduksi kehidupan langsung. Ini, sekali lagi, adalah karakter ganda. Satu sisi, produksi alat-alat subsistensi, makanan, pakaian dan tempat tinggal dan alat yang diperlukan untuk produksi itu, di sisi lain, produksi manusia itu sendiri, penyebaran spesies. Lembaga-lembaga sosial di mana orang-orang dari zaman dan negara tertentu hidup dikondisikan oleh kedua jenis produksi: dengan tahap perkembangan tenaga kerja di satu sisi dan keluarga di sisi lain.³¹

Akan tetapi, dalam perdebatan kontempornya, hubungan antara feminisme dan Marxisme berjalan rumit. Heidi Hartmann mengibaratkan hubungan di antara keduanya sebagai “pernikahan yang tidak bahagia”. Pokok masalahnya, kata Hartmann, adalah karena “mereka menggolongkan perjuangan feminis ke dalam perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan melawan modal”. Jalan keluarnya adalah “perkawinan yang sehat atau bercerai”.³² Harus diakui, kata Hartmann, feminisme abai terhadap sejarah dan “tidak cukup materialis”, sebaliknya Marxisme abai terhadap masalah sex. Maka yang dibutuhkan adalah “penyatuan progresif” (*progressive union*) antara Marxisme dan feminisme yang tentu saja menyaratkan “tidak hanya meningkatkan pemahaman intelektual tentang hubungan antara kelas dan seks tetapi juga praktik kesetaraan dalam politik kiri”.³³ Iris Young tidak sependapat dengan Hartmann ini. Menurutnya, proposal Hartmann masih menempatkan teori relasi produksi Marxist di atas teori relasi gender feminisme. Yang dibutuhkan, kata Young, adalah sebuah teori yang melihat situasi perempuan dalam dua sistem relasi sosial yang berbeda, yaitu kapitalisme dan patriarki. Keduanya tidak bisa diintegrasikan begitu saja. Feminisme sosialis mesti mengkombinasikan wawasan terbaik dari Marxisme dan feminisme untuk memahami kapitalisme patriarkis sebagai suatu sistem yang mana opresi terhadap perempuan adalah atribut intinya. Sementara itu, Gloria Joseph mempertanyakan ketiadaan analisis “ras” baik dalam feminisme maupun marxisme dalam tawaran Hartmann. Lisa Vogel membantah tuduhan para sejawatnya. Menurutnya, tradisi Marxist sebenarnya sangat berdaya dan fleksibel. Masalahnya, para teoretisi dinilai Vogel memiliki pemahaman yang terbatas tentang Marxisme dan mempunyai terlalu sedikit kesadaran dalam mengintegrasikan analisis feminis dalam kategori-kategori Marxis.³⁴

Sekarang kita masuk lagi ke biografi Fraser. Meski mengidentifikasi diri sebagai feminis sosialis, publikasi pertamanya justru menyoroti kontribusi Foucault terhadap feminisme. Menurutnya, konsepsi kekuasaan Foucault memberikan kerangka analisis yang sangat berharga bagi feminisme, sesuatu yang tidak disediakan secara memadai oleh Marxisme dan liberalisme. Kerangka analisis yang

³¹ “According to the materialist conception, the determining factor in history is, in the final instance, the production and reproduction of immediate life. This, again, is of a twofold character. One the one side, the production of the means of subsistence, of food, clothing and shelter and the tools necessary for their production, on the other side, the production of human beings themselves, the propagation of the species. The social institutions under which the people of a particular historical epoch and a particular country live are conditioned by both kinds of production: by the stage of development of labour on the one hand and the family on the other”. Dikutip dalam Bryson, *Feminist*, hlm. 63

³² Hartmann, “The Unhappy Marriage” hlm. 2

³³ Sargent, hlm. xxi

³⁴ Dalam konteks yang lebih kekinian, harus diakui feminisme sosialis mempunyai keterbatasan. Jaggar menyebutkan bahwa sejak awal feminisme sosialis memang mempunyai perhatian besar pada persoalan-persoalan identitas dalam demokrasi. Secara formal mereka ingin menghapuskan rasisme dan berbagai implikasinya terhadap kebijakan-kebijakan redistribusi kekayaan di antara warga negara. Namun hingga awal tahun 1980-an, sebagian besar feminis sosialis adalah kelas menengah kulit putih yang gagal menerjemahkan retorika anti-rasismenya ke dalam seperangkat teori yang bisa diaplikasikan dalam realitas masyarakat multikultural. Untuk mengatasi masalah ini, Jaggar menyarankan feminisme sosialis memahami demokrasi secara lebih luas. Demokrasi bukan hanya urusan satu masyarakat tertentu atau satu tipe masyarakat tertentu, katakanlah masyarakat kapitalisme lanjut, melainkan merupakan urusan internasional. Tanpa sebuah perspektif internasional yang kuat, feminisme sosialis akan kesulitan merumuskan aksi yang dibutuhkan untuk memerangi seksisme, rasialisme, dan, yang paling penting, kapitalisme. Alison M. Jaggar, *Feminist Politics and Human Nature* (New Jersey: Rowman & Allanheld, 1983), hlm. 344.

dimaksud mencakup bagaimana kekuasaan dalam pengertiannya yang mikro dikonstruksikan dalam praktik sosial sehari-hari melalui mekanisme pengetahuan tertentu. Bagi Fraser, kerangka ini sangat membantu feminis pada tataran empiris. Meski demikian, pada tataran normatif, kerangka tersebut mempunyai kesulitan dalam memancangkan titik berangkat dan titik tuju dari emansipasi gerakan feminis. Pembacaan terhadap Foucault membawa Fraser ke dalam kancah perdebatan di tahun 1980-an mengenai relasi antara feminisme dan postmodernisme. Konteksnya adalah “belokan kultural” (*cultural turn*) yang sangat krusial sejarah pemikiran. Belokan ini merupakan bagian dari pergeseran corak kapitalisme yang lebih luas. Mode kapitalisme yang dikelola oleh negara mulai digeser oleh mode kapitalisme finansial atau neoliberal. Bersamaan dengan itu, perhatian terhadap identitas dan masalah-masalah kebudayaan meningkat, termasuk menguatnya pengaruh posmodernisme dalam perdebatan teori sosial dan filsafat politik. Hal ini tentu berdampak terhadap feminisme. Orientasi mereka yang sebelumnya lebih tertuju pada isu-isu kesetaraan kemudian bergeser ke isu-isu keberagaman.³⁵

Perhatian Fraser terhadap Foucault bersamaan dengan perhatiannya yang serupa terhadap Habermas. Menurut Fraser, dua filsuf penting ini sama-sama berkontribusi pada pembangunan fondasi intelektual feminisme. Pendapat ini tercermin dalam buku *Feminist Contentions* yang merekam perdebatan para pemiki feminis, termasuk Fraser, terutama dalam menjawab tantangan posmodernisme. Dalam perdebatan ini, Fraser berusaha menjadi suatu titik temu antara perspektif Habermas yang diwakili oleh Seyla Benhabib dan perspektif Foucault yang diwakili oleh Judith Butler. Bagi Fraser, alih-alih saling menegasikan, keduanya justru bisa saling mengisi.³⁶ Sementara perspektif Habermas berorientasi pada klaim validitas yang implisit dalam komunikasi intersubjektif, yang kemudian menjadi dasar etika diskursus dan konsepsi demokrasi yang prosedural, perspektif Foucauldian berorientasi pada pluralitas yang kontingen, yang secara historis spesifik, yaitu suatu rezim diskursif yang sarat oleh kekuasaan yang membangun beragam posisi subjek di mana inovasi dimungkinkan.³⁷ Sementara itu, sebagian perspektif Habermas dan Foucault sebagaimana mengemuka pada pemikiran Benhabib dan Butler bisa diterima karena menawarkan beberapa sumber daya yang sangat diperlukan. Mereka secara meyakinkan membela kebutuhan feminis untuk kritik normatif, suatu historiografi berorientasi emansipasi, dan perhatian teoritis terhadap tindakan dan perbuatan perempuan. Dengan menempatkan klaim validitas yang tersirat dalam komunikasi intersubjektif, Benhabib tidak hanya menempatkan pertanyaan-pertanyaan etis sebagai pusat perhatian feminis, tetapi juga secara implisit menempatkan perempuan sebagai subjek sosial yang mampu berbicara dan bertindak melawan dominasi. Kerangka Habermasian yang dipakai oleh Benhabib juga memberikan tolok ukur normatif kritik terhadap institusi, yaitu suatu kondisi ideal dari ranah publik yang demokratis, sebuah arena wacana publik yang dilembagakan di mana norma-norma prosedural tentang keadilan dan kesetaraan mendorong paritas partisipasi dalam memberi dan menanyakan klaim yang rasional.³⁸ Akan tetapi, lanjut Fraser, pendekatan Habermas dalam pemikiran Benhabib tidak menyediakan semua yang dibutuhkan feminis. Bagaimanapun, orientasi proseduralnya menempatkan wacana dalam tanda kurung, sehingga secara praktis tidak dapat membantu feminisme mengklarifikasi substansi konkret dari makna gender, atau silsilah historisnya, maupun efek kontempornya. Selain

³⁵ Fraser, *The Unruly Practices*.

³⁶ Seyla Benhabib et.al., *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange* (London/New York: Routledge, 1995), hlm. 158

³⁷ Nancy Fraser, “Pragmatism, Feminism, and the Linguistic Turn”, Seyla Benhabib et.al., *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange* (London/New York: Routledge, 1995), hlm. 158. “Derrida juga menciptakan neologisme ‘falogosentrisme’. Ini menggabungkan logosentrisme dan falosentrisme, istilah yang awalnya digunakan oleh psy-choanalyst Ernest Jones untuk mengkritik bias analitis Freud terhadap lingga. Derrida membawa istilah tersebut ke dalam permainan untuk mendekonstruksi referensi Lacanian ke lingga sebagai penanda utama dalam tatanan simbolik”. Simon Morgan Mortham, *The Derrida Dictionary* (New York: Continuum, 2010), hlm. 89

³⁸ Nancy Fraser, “Pragmatism, Feminism, and the Linguistic Turn”, hlm. 160.

itu, fokus pada justifikasi dan validitas meminggirkan pertanyaan tentang motivasi dan keinginan. Akibatnya ia tidak dapat membantu feminisme dalam memahami mengapa perempuan terkadang berpegang teguh pada perspektif yang merugikan mereka. Singkat kata, karena menekankan masalah partisipasi dalam diskursus, pendekatan Benhabib memang menghargai sisi aktif individu dalam praktik komunikatif, tetapi mengabaikan sisi pasif yang dibentuk oleh lingkungan yang mengitarinya.³⁹

Kekurangan perspektif Habermas sebagaimana diangkat oleh Benhabib, menurut Fraser, bisa diisi oleh perspektif Foucault yang mengemuka dalam pemikiran Judith Butler. Butler cukup meyakinkan dalam menyajikan kritik denaturalisasi, yaitu kritik yang mengungkapkan kontingensi, yang dibangun secara performatif dari apa yang dianggap perlu dan tidak dapat diubah. Dari perspektif Butler, kekuasaan melekat pada proyek naturalisasi dan reifikasi isi diskursus yang kontingen dan yang secara aktif dikonstruksikan oleh kekuatan dominan, terutama yang terkait dengan identitas gender. Namun bagi Butler, dominasi tetap merupakan sesuatu yang diperebutkan, sehingga yang muncul adalah suatu konstruksi performatif. Menurut Fraser, model kritik Butler semacam ini berguna tidak hanya untuk menyingkap produksi makna yang sering diterima begitu saja, tetapi juga membuka ruang bagi produksi alternatif. Yang terakhir ini tidak muncul secara *ex nihilo*, tetapi melalui apa yang Butler sebut sebagai tindakan iterasi atau perulangan yang juga merupakan inovasi. Paradoksnya, tindakan ini dilakukan dari, dan memang dimungkinkan oleh, posisi subjek yang dengan sendirinya dikonstruksi oleh dominasi rezim diskursif yang mereka lawan.⁴⁰ Meski demikian, bagi Fraser, pendekatan Butler tidak memberi semua yang feminisme butuhkan. Prinsip normatifnya tidak kuat, tidak memberikan orientasi yang pasti terhadap tujuan feminisme. Oleh karena itu, pemikiran Butler membutuhkan dasar etika yang lebih kuat untuk mencapai efek emansipatorisnya,⁴¹ Ia cocok untuk teoretisasi level mikro, intrasubjektif, dan historisitas relasi gender, tetapi tidak memadai untuk teoretisasi level makro, intersubjektif, dan normatif.⁴²

Bertolak dari dialog kritis antara perspektif Habermas dan Foucault tersebut, Fraser mewacanakan feminisme yang berbasis pada “sebuah pendekatan neopragmatis yang tidak murni, eklektik, dan menggabungkan fitur-fitur terkuat dari ketiganya”. Pendekatan ini “mencakup seluruh proses dimana makna sosiokultural gender dibangun dan diperebutkan” yang akan “memaksimalkan kemampuan kami untuk melawan hegemoni gender saat ini dan untuk membangun kontra-hegemoni feminis”.⁴³ Tujuan pokoknya adalah “mengkoneksikan analisis diskursif signifikansi gender dengan analisis kelembagaan struktur ekonomi politik”.⁴⁴ Dapat dikatakan ini adalah visi utama keterlibatan Fraser dalam feminisme yang kelak terus disuarakan dalam baik dalam karir kesarjanaannya di dunia akademis maupun aktivismenya di ruang publik yang lebih luas.

Teori Kritis

Pada tahun 1960-an Fraser adalah seorang aktivis mahasiswa sosialis radikal. Sebagaimana generasinya, khususnya di AS, bacaannya adalah Herbert Marcuse. Dapat dikatakan ini adalah pengenalan pertama Fraser dengan teori kritis mazhab Frankfurt. Namun memasuki era 1980-an, interaksi intelektual Fraser dengan tradisi itu menjadi semakin jelas. Tentu saja dalam lanskap akademis AS, teori kritis adalah pinggiran. Beruntung Fraser kemudian tergabung dengan The New School of Social Research, sebuah sekolah pascasarjana di New York yang terkenal sebagai tempat

³⁹ Nancy Fraser, “Pragmatism, Feminism, and the Linguistic Turn”, hlm. 161.

⁴⁰ Fraser, “Pragmatism, Feminism, and the Linguistic Turn”, hlm. 161

⁴¹ Fraser, “Pragmatism, Feminism, and the Linguistic Turn”, hlm. 162.

⁴² Fraser, “Pragmatism, Feminism, and the Linguistic Turn”, hlm. 164.

⁴³ Fraser, “Pragmatism, Feminism, and the Linguistic Turn”, hlm. 158.

⁴⁴ Fraser, “Pragmatism, Feminism, and the Linguistic Turn”, hlm. 160

berkumpulnya teoretisi kritis. Di sekolah ini Fraser terus menerus membangun dialog pemikiran antara feminisme dan kritis hingga sekarang.⁴⁵

Sebagaimana telah disinggung di depan, Fraser adalah salah satu pemikir teori kritis mazhab Frankfurt generasi ketiga.⁴⁶ Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi ketiga ini lebih beragam, termasuk keberadaan para pemikir perempuan yang menghubungkan tradisi teori kritis dan feminisme menjadi lebih mendalam. Selain Fraser, terdapat nama lainnya, seperti Seyla Benhabib. Keduanya dikenal sebagai penafsir Habermas terkemuka. Sementara Benhabib cenderung mengaitkan kembali sejumlah konsepsi Habermas dengan Hegel, Fraser lebih terlihat mengkoneksikannya dengan Marx. Dengan kata lain, corak sosialis dari pemikiran Fraser memang lebih menonjol dibanding dengan Benhabib dan pemikir teori kritis dan feminis lainnya. Teori kritis mazhab Frankfurt sendiri adalah suatu aliran pemikiran yang sangat kompleks. Para pendirinya berasal dari latar belakang keilmuan yang beragam, tetapi memang disatukan untuk memberika kritik terhadap situasi zaman itu yang dibayang-bayangi oleh kemunculan fasisme. Mereka tidak hanya tidak puas dengan Marxisme yang mengejawantah ke dalam bentuk negara komunis, tetapi juga gagasan sosial-demokrasi yang membentuk paradigma kesejahteraan di negara-negara Barat liberal.

Relasi antara teori kritis dan feminisme sangat kompleks.⁴⁷ Sejumlah perdebatan mengenai tema ini memperlihatkan beragam interpretasi feminis terhadap Habermas yang menurut Fraser “hampir tidak ada yang dikatakan [oleh Habermas] tentang gender”.⁴⁸ Meski demikian, Fraser mengakui bahwa konsepsi Habermas mengenai “sistem” dan “dunia kehidupan” sangat berguna bagi feminis untuk mengkritisi dikotomi antara publik dan privat. Konsepsi ini dipakai oleh Habermas ketika menjelaskan hubungan yang rumit antara negara, masyarakat, ekonomi dan keluarga. Yang problematis dari penjelasan Habermas, kata Fraser, adalah asumsi bahwa perempuan hanya menempati dunia kehidupan di masyarakat sipil dan keluarga.⁴⁹

Hal penting yang dilakukan oleh Fraser adalah membawa kembali kapitalisme dalam perdebatan teori kritis. Ini merupakan terobosan mengingat posisi kritik kapitalisme di kalangan teoretisi kritis dipertanyakan.⁵⁰ Usaha generasi pertama, seperti Adorno dan Horkheimer, untuk menghindari ekonomisme sebagaimana dipahami oleh Marxisme vulgar membuat mereka lebih mengarahkan kritiknya pada “dialektika Pencerahan” dan “industri kebudayaan”. Dalam bahasa Agger, kritik utama generasi pertama teoretisi mazhab Frankfurt bukan lagi kapitalisme, tetapi “filsafat Barat yang mendominasi yang lain”.⁵¹ Sementara itu, meski awalnya Habermas digadag-gadang oleh para aktivis mahasiswa radikal 1960-an sebagai pemikir gerakan mereka, dalam perkembangannya Habermas justru terlihat menjauh dari Marxisme dan justru mendekat ke Kantianisme. Mengikuti pendapat Azmanova, bahkan sejak awal teori kritis lebih terfokus pada kritik “relasional” daripada kritik “dominasi sistemik” yang diajarkan oleh Marx. Khususnya lagi sejak *linguistic turn* dalam filsafat, teori kritis dinilai semakin menjauh dari kritik kapitalisme. Dalam analisis Azmanova, perpisahan antara kritik relasional dan kritik dominsi sistemik dalam tradisi teori kritis terjadi karena perubahan objek dan metode kritik teori kritis itu sendiri.⁵²

⁴⁵ Patricia Mooney Nickel (ed.), *North American Critical Theory after Postmodernism: Contemporary Dialogues* (New York: PalgraveMacmillan, 2012), hlm. 155-172

⁴⁶ Amy Allen, “Third Generation Critical Theory: Benhabib, Fraser, and Honneth”, dalam Rosi Braidotti (ed.), *The History of Continental Philosophy*, Vol. 7, 2010, hlm. 129-148.

⁴⁷ Amy Allen, “Critical Theory and Feminism” dalam Axel Honneth, Espen Hammer, dan Peter E. Gordon (ed.), *The Routledge Companion to the Frankfurt School* (New York/Oxon: Routledge, 2019), hlm. 528-541.

⁴⁸ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 19.

⁴⁹ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 20.

⁵⁰ Albenaz Azmanova, “Crisis? Capitalism is Doing Very Well. How is Critical Theory?”, *Constellations*, Vol. 21, No. 3, 2014.

⁵¹ Ben Agger, *Critical Social Theories* (New York: Oxford University Press, 2013)

⁵² Albenaz Azmanova, “Crisis? Capitalism is Doing Very Well. How is Critical Theory?”, *Constellations*, Vol. 21, No. 3, 2014.

Akan tetapi, menurut hemat saya, Fraser cukup menjawab tantangan Azmanova tersebut. Usahanya untuk mendekatkan feminisme dan teori kritis di satu sisi, lalu teori kritis dan kritik kapitalisme di sisi yang lain menyumbangkan sesuatu yang berharga. Selain mengembalikan kritik kapitalisme pada posisi sentral dalam teori kritis, pengertian mengenai kapitalisme itu sendiri meluas mengikuti sudut pandang feminisme. Apa yang oleh Marx disebut sepintas sebagai reproduksi sosial sebagai salah satu dimensi dari kapitalisme selain produksi ekonomi sekarang dikembangkan lebih lanjut. Konsep dominasi yang pokok dalam teori kritis mazhab Frankfurt sekarang mencakup pengalaman hidup sehari-hari perempuan baik di rumah maupun di kantor atau pabrik secara bersamaan. Bagian selanjutnya akan membahas ini lebih lanjut.

Resignifikansi Kritis

Di atas telah dikemukakan bahwa kritik Fraser terpusat pada kelupaan para feminis terhadap dinamika kapitalisme, sehingga kurang atau bahkan tidak menyadari kritik mereka terhadap bias gender kapitalisme negara justru menjadi legitimasi, semacam spirit, bagi kapitalisme neoliberal. Paparan selanjutnya akan membahas problematik ini. Diawali oleh penjelasan mengenai kritik feminis terhadap kapitalisme yang dikelola negara, berikutnya adalah penjelasan mengenai bagaimana kritik tersebut malah diambil alih oleh kapitalisme neoliberal dalam menjustifikasi dirinya. Terakhir Fraser merefleksikan apa yang seharusnya dilakukan oleh feminis di era krisis neoliberal sekarang.

Feminisme dan Kapitalisme yang dikelola oleh Negara

Sebagaimana telah dikemukakan, feminisme gelombang kedua yang muncul di tahun 1960-an adalah sebetulnya kritik terhadap kapitalisme dan kondisi masyarakat kapitalis saat itu. Dalam suasana ekonomi pasca-Perang yang mulai menggeliat, yang kemudian melahirkan rezim negara kesejahteraan di negara-negara Barat, kaum feminis menemukan adanya ketidakadilan yang terutama mendera perempuan. Ketidakadilan itu bukan hanya soal akses perempuan pada pendidikan dan politik sebagaimana diperjuangkan feminisme gelombang pertama, tetapi ketidakadilan sosial secara lebih luas. Dari sini mengemuka apa yang di atas telah dibahas, yaitu kapitalisme patriarkis. Berbeda dengan kritik feminisme gelombang pertama yang terbatas pada aspek kesadaran, kritik feminisme gelombang kedua lebih menasar pada dimensi ketimpangan sosial ekonomi.

Konteks spesifik yang menjadi target kritik feminisme gelombang kedua adalah “kapitalisme yang dikelola oleh negara” (*state-managed capitalism*). Istilah ini tidak hanya mengacu pada model pengelolaan ekonomi seperti dilakukan di negara-negara komunis, tetapi juga membidik model sosial demokrasi yang berlaku di negara-negara Barat liberal. Fraser mengutip pendapat Frederick Pollock yang menyebut terdapat setidaknya tiga ciri “kapitalisme negara”. Pertama, pemerintah mengambil alih kontrol terhadap koordinasi produksi dan distribusi yang sebelumnya dipegang oleh pasar. Dengan ini secara otomatis pemerintah mempunyai otoritas untuk mengintervensi kebebasan perdagangan, perusahaan, dan tenaga kerja. Akibatnya, hukum ekonomi yang sebelumnya membuat pasar otonom menghilang. Kedua, dalam menjalankan kontrol tersebut, negara menggunakan kombinasi perangkat lama dan baru, termasuk pasar semu, untuk mengatur dan memperluas produksi dan mengkoordinasi konsumsi. Ketiga, secara praktis negara menjadi instrumen kekuasaan dari kelompok penguasa baru yang dihasilkan dari penggabungan kepentingan pribadi yang paling kuat, personil rangking atas dalam manajemen industri dan bisnis, strata yang lebih tinggi dari birokrasi negara (termasuk militer), dan tokoh-tokoh terkemuka dari pihak birokrasi.⁵³

⁵³ Frederick Pollock, “State Capitalism: Its Possibilities and Limitations” dalam Andrew Arato dan Eike Gebhardt (eds.), *The Essential Frankfurt School Reader* (London: Continuum, 1982), hlm. 95-118.

Dipandang dari sudut feminisme, kapitalisme yang dikelola oleh negara berjalan di atas norma-norma gender tertentu. Mereka memahami gender seperti diferensiasi kelas yang berakar pada struktur masyarakat tertentu. Di sana terdapat suatu prinsip organisasi dasar yang bekerja berdasarkan pembagian fundamental antara tenaga kerja produktif upahan di mana laki-laki adalah penanggung jawab utamanya dan tenaga kerja reproduktif non-upahan di mana perempuan adalah penanggung jawab utamanya. Prinsip ini juga menyusun pembagian dalam buruh upahan tinggi yang didominasi oleh laki-laki yang bekerja di sektor manufaktur serta pekerjaan profesional dan tenaga upahan rendah yang didominasi oleh perempuan “kerah pink” dan pekerjaan layanan domestik. Hasilnya, menurut Fraser, adalah struktur ekonomi yang menghasilkan bentuk-bentuk ketidakadilan distributif berbasis gender.⁵⁴ Dalam situasi “di mana negara memainkan peran aktif dalam mengarahkan perekonomian nasional” itu terbentuk “formasi sosial hegemonik” yang problematik.⁵⁵ Fraser merumuskan empat problematik yang paling fundamental, yaitu ekonomisme, androsentrisme, etatisme, dan Westphalianisme.

Pertama, ekonomisme. Kapitalisme yang dikelola negara menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengatur pasar ekonomi. Legitimasi politik mereka didapatkan dengan cara mempromosikan inklusi, kesetaraan sosial, dan solidaritas lintas-kelas. Dalam kapitalisme yang dikelola negara, pertanyaan-pertanyaan sosial dibingkai dalam politik redistribusi, seputar pengalokasian barang, pendapatan, dan pekerjaan, sedangkan pembagian sosial dilihat berdasarkan perspektif kelas.⁵⁶

Kedua, androsentrisme.⁵⁷ Di era kapitalisme yang dikelola negara, warga negara ideal adalah laki-laki pekerja sebagai pencari nafkah (*breadwinner*) dan laki-laki pecinta keluarga (*family man*). Upah suami diasumsikan sebagai pokok dari ekonomi keluarga, sedangkan pendapatan istri, jika ada, dianggap penambah atau pelengkap saja. Upah keluarga (*family wage*) menjadi konsep penting pada periode ini, meski dalam kenyataannya ia masih kurang dalam menafkahi anak dan perempuan/istri. Tetapi di sana peran laki-laki/suami menjadi penting. Sebaliknya, kerja pengasuhan non-upahan dan reproduktif dikaburkan keberadaannya.⁵⁸

Ketiga, etatisme. Kapitalisme yang dikelola negara dicirikan oleh penggunaan etos manajerial oleh para teknokrat. Dalam kerangka ini, para pengguna kebijakan pembangunan dan kesejahteraan diandaikan adalah para klien, konsumen, dan pembayar pajak daripada warga negara aktif. Akibatnya, pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan direduksi ke dalam ukuran-ukuran teknis yang dikalkulasikan oleh para teknokrat. Tidak ada deliberasi dan kontestasi politik, sebab warga negara dianggap objek pasif.⁵⁹

Keempat, Westphalianisme. Kapitalisme yang dikelola negara adalah suatu formasi nasional. Istilah Westphalian sendiri merujuk pada perjanjian Westphalian pada bulan Oktober 1648 yang

⁵⁴ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 162.

⁵⁵ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 212.

⁵⁶ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 212.

⁵⁷ Istilah androsentrisme sendiri untuk pertama kali dikemukakan oleh Charlotte Perkins Gilman, seorang feminis AS gelombang pertama, pada tahun 1911. Dia mengatakan bahwa kebudayaan kita adalah kebudayaan androsentrik dan apa yang disebut “*human nature . . . was in great part only male nature.*”⁵⁷ Bahkan hingga tahun 1970-an, hampir semua teori sosial pada dasarnya lahir dari pengalaman laki-laki yang kemudian diasumsikan berlaku universal. Laki-laki adalah norma, sementara perempuan adalah “yang lain”. Dalam teori-teori sosial hingga saat itu perempuan dibayangkan sebagai sesuatu yang eksotis atau pengecualian yang mengganggu. Dalam filsafat, salah satu bentuk androsentrisme bisa ditemukan dalam teori enam tahap perkembangan moral Kohlberg yang sangat terkenal itu. Belakangan Carol Gilligan membuktikan teori Kohlberg kurang lengkap karena tidak mengikutsertakan pengalaman perempuan. Dikutip Susan A. Basow. “Androcentrism” dalam Judith Worell (ed.), *Encyclopedia Women & Gender* (San Diego: Academic Press, 2002), hlm. 125.

⁵⁸ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 213.

⁵⁹ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 213.

menandai perang tiga puluh tahun antara Katolik dan Protestan yang mana dari sini pembentukan negara-bangsa modern yang terpisah dari otoritas gereja dimulai. Dari sini pula konsep teritorial terbatas yang menjadi dasar keadulatan sebuah negara nasional diakui. Kapitalisme negara menggunakan kerangka ini untuk membentuk pandangan bahwa obligasi keadilan hanya mengikat warga negara, bukan yang lain. Dengan kata lain, ruang lingkup keadilan adalah arena domestik dengan batas-batas teritorial yang tegas. Oleh karena itu, bagi pemerintah nasional, isu hak asasi manusia dan solidaritas anti-imprealis yang lintas-batas sering hanya menjadi hiasan bibir belaka.⁶⁰

Empat problematik dalam kapitalisme yang dikelola negara itu dikritik oleh feminisme gelombang kedua. Fraser merumuskannya demikian. Pertama, kontra-ekonomisme. Dengan mengajukan proyek "*the personal is the political*", kalangan feminis memperluas makna keadilan, tidak hanya fokus pada gender, tetapi juga kelas, "ras", seksualitas, dan bahkan nasionalitas. Mereka menolak pendekatan Marxisme yang hanya memusatkan diri pada ekonomi-politik, juga liberalisme yang hanya mengurus hukum. Kalangan feminis memandang keduanya gagal melihat ketidakadilan di tempat-tempat lain, seperti di keluarga, tradisi kultural, masyarakat sipil, dan dalam kehidupan sehari-hari.⁶¹

Kedua, kontra-androsentrisme. Feminisme memperlihatkan bahwa androsentrisme dalam suatu pembagian kerja berbasis gender secara sistematis mengurangi aktivitas yang terkait dengan perempuan, baik yang berupa maupun tidak. Mereka menunjukkan hubungan yang erat antara tanggung jawab besar perempuan dalam hal kerja kepengasuhan tak berbayar, subordinasi mereka dalam pernikahan dan kehidupan personal, segmentasi pasar kerja berbasis gender, dominansi sistem politik laki-laki termasuk dalam regulasi kesejahteraan, kebijakan industrial, dan skema-skema pembangunan. Akibatnya, upah keluarga adalah poin di mana maldistribusi, misrekognisi, dan misrepresentasi gender bertemu.⁶²

Ketiga, kontra-etatisme. Seperti sejawat kiri baru lainnya, tetapi dengan menambahkan analisis gender, para aktivis feminis gelombang kedua mengkritik dominasi model Fordis yang mengemuka pada tahun 1960-an. Model ini, yang awalnya mengacu pada Henry Ford, mengacu pada sistem produksi massal di pabrik-pabrik di mana para pekerja diatur berdasarkan skala dan standar kerja. Mereka menyebut sistem tersebut bersifat *top-down* yang mencerminkan maskulinitas kapitalisme negara. Akan tetapi, kalangan feminis tidak pernah menolak keberadaan negara. Mereka lebih memilih untuk mengisinya dengan nilai-nilai feminis dengan melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam proses demokrasi. Tujuannya bukan untuk menghilangkan negara, tetapi juga mendorong agar negara turut serta dalam promosi gender.⁶³

Keempat, kontra dan pro-etatisme. Feminisme gelombang kedua bersikap ambivalen terhadap kerangka Westphalia. Pada satu sisi mereka cenderung melihat adanya ketidakadilan lintas-batas. Hal ini, misalnya, terlihat dalam gelombang protes terhadap Perang Vietnam. Di negara-negara berkembang, sensitivitas itu lebih terasa. Kritik gender berjaln kelindan dengan kritik imperialisme. Namun pada saat yang sama kalangan feminis juga masih berpikir bahwa negara-bangsa adalah instrumen penting dalam kepengaturan sosial. Lagi pula pada masa itu teknologi yang memungkinkan bekerjanya jaringan transnasional belum tersedia. Oleh karena itu, slogan "*sisterhood is global*" lebih merupakan gestur abstrak daripada proyek politik yang kongkret.⁶⁴

Feminisme dan Neoliberalisme

⁶⁰ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 212-213.

⁶¹ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 214.

⁶² Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 215.

⁶³ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 216.

⁶⁴ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 216-217.

Sejak akhir tahun 1970-an, kapitalisme yang dikelola negara kolaps. Model negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak mampu lagi dipertahankan karena biayanya sangat mahal. Piramida terbalik demografi di negara-negara Barat (*ageing society*) membuat negara kelimpungan. Di atas semuanya, embargo minyak yang dilakukan oleh negara-negara The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) terhadap Amerika Serikat dan negara sekutunya membuat tata ekonomi politik global berubah drastis. Dalam situasi ini dominasi model kapitalisme yang dikelola negara merosot dan lalu digantikan oleh neoliberalisme.⁶⁵

Ciri paling kentara dari neoliberalisme adalah perubahan kontrol negara terhadap perekonomian yang banyak digantikan oleh volatilitas pasar finansial. Berbagai skema penyesuaian struktural dijalankan oleh pemerintahan negara nasional. Program kesejahteraan, sebagai akibatnya, dialihkan penanganannya dari negara ke swasta atau masing-masing pribadi warga. Di tengah situasi ini, pemerintah dipaksa membuka sektor perekonomian kepada pasar seluas-luasnya. Privatisasi dan deregulasi digulirkan. Proses ini dipayungi oleh gagasan demokrasi dan hak asasi manusia yang telah menjadi narasi besar dalam percaturan politik global. David Harvey menulis bahwa “neoliberalisme pertama-tama adalah dalam teori praktik ekonomi politik yang mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan dengan melepaskan kebebasan dan keterampilan individu dalam kerangka kerja kelembagaan yang ditandai dengan hak milik pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas yang kuat”.⁶⁶ Di bawah panji neoliberalisme, proyek kesejahteraan diajukan sebagai bentuk rekonsiliasi antara komitmen pada pasar bebas dan politik inklusi. Berpijak pada konsepsi liberal tentang otonomi individual, negara neoliberal mengembangkan wawasan bahwa semua orang tanpa terkecuali mempunyai kemampuan dalam mengembangkan diri. Kewirausahaan warga dipupuk sebagai pengganti negara yang telah kehilangan peranannya dalam perekonomian. Pada tataran politik, tidak sedikit rezim neoliberal mengambil corak populis atau neopopulis.⁶⁷

Perubahan dari kapitalisme yang dikelola negara ke neoliberalisme bersamaan dengan kebangkitan gejala politik identitas, khususnya sejak berakhirnya era Perang Dingin. Fraser menyebutnya sebagai kondisi “pasca-sosialis”.⁶⁸ Dalam situasi ini, imajinasi gerakan feminis pun mengalami perubahan. Mereka mengalihkan minat utamanya dari isu-isu redistribusi ke rekognisi.⁶⁹ Tema-tema tentang perbedaan kultural dan orientasi seksual mendominasi perdebatan mereka. Hingga tahap tertentu, perubahan kondisi pasca-Perang Dingin ini membantu gerakan feminis meruntuhkan tantangan yang menghadang mereka pada periode sebelumnya, yaitu ekonomisme, androsentrisme, etatisme, dan Westphalianisme. Sejak itu pula perjumpaan kalangan feminis dan post-modernisme semakin intensif. Dari perjumpaan ini analisis-analisis gender berbasis keragaman kultural dihasilkan. Meski menyumbang cara pandang baru dalam memahami keragaman kultural, perkembangan ini dinilai Fraser problematik karena secara tidak langsung justru memberi legitimasi bagi neoliberalisme yang dalam banyak hal membawa efek buruk dalam perjuangan menuju keadilan gender. Pokok ini menjadi pusat perhatian Fraser. Untuk itu, suatu rekonstruksi historis mengenai gerakan feminis dibutuhkan untuk memahami posisi mereka di tengah perubahan zaman. Dari perspektif rekognisi, gender muncul sebagai suatu diferensiasi status, berakar pada suatu tatanan status masyarakat. Kode gender meresap pola interpretasi dan evaluasi kultural, yang penting untuk tatanan status secara keseluruhan. Dengan demikian, fitur utama dari ketidakadilan gender adalah androsentrisme, yaitu suatu pola nilai budaya dilembagakan yang mengistimewakan sifat-sifat terkait dengan maskulinitas,

⁶⁵ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 217.

⁶⁶ David Harvey, *Neoliberalism* (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 2.

⁶⁷ Kanishka Jayasuriya, *Statecraft, Welfare, and the Politics of Inclusion* (New York: Palgrave Macmillan, 2006), hlm. 1-7.

⁶⁸ Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflection on “Postsocialist” Conditions* (London: Routledge, 1997)

⁶⁹ Perdebatan mengenai feminisme dan pascamodernisme dirangkum dalam Seyla Benhabib *et. al.*, *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange* (London/New York: Routledge, 1995)

sambil mendevaluasi semua kode “feminin” yang secara paradigmatis adalah adalah, tapi tidak hanya, perempuan.⁷⁰

Akan tetapi, menurut Fraser, di hadapan rezim neoliberal feminisme mengalami kebuntuan karena kritiknya atas empat elemen kapitalisme negara ternyata mengalami “resignifikasi” atau pemanfaatan ulang.⁷¹ Kritik mereka terhadap empat tantangan di era kapitalisme negara justru diambil alih oleh neoliberalisme untuk melegitimasi keberadaan dirinya. Pada kondisi ini feminisme dan neoliberalisme terlibat “hubungan yang berbahaya”.⁷² Oleh karena itu, Fraser secara keras menyebut feminisme kontemporer sebagai “pelayan perempuan” neoliberalisme.⁷³ Resignifikasi kritik feminisme oleh neoliberalisme dipaparkan oleh Fraser sebagai berikut. Pertama, resignifikasi anti-ekonomisme. Kritik feminisme atas ekonomisme, di mana “pembangunan” dimengerti hanya dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, justru digunakan oleh neoliberalisme yang berusaha mengalihkan perjuangan sosial-ekonomi menjadi perjuangan identitas.⁷⁴ Kedua, resignifikasi anti-androsentrisme. Kritik feminisme atas androsentrisme justru dimanfaatkan oleh neoliberalisme sebagai legitimasi bagi akumulasi modal mereka dengan dengan pembukaan kesempatan kerja besar-besaran bagi buruh perempuan upahan.⁷⁵ Ketiga, resignifikasi anti-etatisme. Kritik feminisme atas etatisme atau paternalisme negara-kesejahteraan justru dipakai balik oleh neoliberalisme untuk memukul agenda negara kesejahteraan. Menggunakan kritik “negara pembantu” (“*nanny state*”), para perencana pembangunan neoliberal membangun argumen mereka tentang pentingnya kewirausahaan dan proyek-proyek kredit keuangan mikro.⁷⁶ Keempat, resignifikasi pro-kontra Westphalianisme. Kritik feminisme atas Westphalianisme pada kenyataannya satu nafas dengan proyek kosmopolitanisme neoliberal yang sedang berusaha membangun mendelegitimasi kepentingan nasional yang terkait dengan negara-bangsa tertentu.⁷⁷

Implikasi dari pergeseran kapitalisme yang dikelola negara ke neoliberalisme dalam imajinasi feminis berbeda dari satu ke tempat lain. Di negara-negara Dunia Pertama, pergeseran ini ditandai dengan menurunnya pengaruh gagasan sosial demokrasi di kalangan feminis yang digantikan oleh munculnya berbagai varian Jalan Ketiga (*The Third Way*). Sementara gagasan sosial demokrasi fokus pada redistribusi ekonomi, berbagai varian Jalan Ketiga mengadopsi fleksibilitas pasar kerja neoliberal sambil pada saat yang sama tetap mempertahankan suatu profil politik progresif. Para feminis Jalan Ketiga tidak lagi terobsesi untuk memitigasi ketimpangan ekonomi, melainkan lebih tertarik untuk mengatasi hierarki status melalui advokasi kebijakan anti-diskriminasi dan multikulturalisme.⁷⁸ Sementara itu, di negara-negara bekas komunis, politik rekognisi mengemuka dalam gerakan-gerakan berbasis nasionalitas dan agama. Seiring dengan kejatuhan komunisme itu sendiri, paradigma redistribusi yang sepenuhnya bersifat ekonomis kehilangan legitimasinya. Di tempat lain, di negara-negara Dunia Ketiga, berakhirnya Perang Dingin adalah salah satu konteks bagi kemunculan politik rekognisi di mana gerakan feminis juga mendapatkan pengaruhnya. Pada satu sisi, berakhirnya pertentangan antara kutub Barat yang dipimpin oleh AS dan kutub Timur yang dipimpin oleh Soviet mengurangi aliran bantuan ke negara-negara pinggiran. Pada sisi yang lain,

⁷⁰ Fraser, *Fortune*, hlm. 162.

⁷¹ Istilah “resignifikasi” diambil Fraser dari Judith Butler, “Contingent Foundation” dalam Seyla Benhabib, et. all., *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange* (New York: Routledge, 1994)

⁷² Hester Eisenstein, “A Dangerous Liaison? Feminism and Corporate Globalization”, *Science & Society*, Vol. 69, No. 3 (Juli, 2005), hlm. 487-518.

⁷³ Nancy Fraser, “How feminism became capitalism's handmaiden and how to reclaim it” <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal>

⁷⁴ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 219.

⁷⁵ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 219-221.

⁷⁶ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 221-222.

⁷⁷ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 222-223.

⁷⁸ Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World* (New York: Columbia University Press, 2010), hlm. 106-107.

pembongkaran terhadap rezim finansial Bretton Woods mendorong terjadinya penyesuaian struktural kebijakan neoliberal yang pada ujungnya mengancam kelangsungan pembangunan negara-negara pascakolonial. Akibatnya tentu saja adalah pengurangan besar-besaran proyek redistribusi egalitarian di negara-negara Selatan. Dalam situasi baru ini, politik identitas muncul dalam bentuk aspirasi komunal dan otoritarian. Gerakan feminis dihadapkan pada kondisi yang sulit. Pada satu sisi kapasitas negara turun, tetapi pada sisi lain chauvinisme komunalis menguat.

Secara khusus Fraser mengangkat kasus Amerika Serikat (AS). Terutama setelah peristiwa 9/11, isu gender mengemuka seiring dengan politik kebijakan *war on terror* pemerintahan Bush. Sambil memobilisasi semangat patriotis dengan kampanye anti-teroris di seluruh dunia, pemerintahan Bush juga menggunakan manipulasi isu gender sebagai strategi pemenangannya di dalam negeri. Bahkan ketika menyatakan bahwa *war on terror* sebagai masalah kepemimpinan, Bush menggunakan asumsi-asumsi gender dalam retorika kampanyenya. Dia mengolah citra maskulin sebagai seorang komandan tertinggi yang menjaga negara tanpa ragu dan bimbang. Dia mencitrakan dirinya sebagai sosok lelaki sejati. Hal ini kontras dengan kesan yang disematkan kepada lawannya dari Partai Demokrat, John Kerry, yang oleh Arnold Schwarzenegger disebut sebagai “*girlie man*” yang dianggap tidak mampu menjaga wanita dan anak-anak AS dari kekerasan. Kampanye berbasis sentimen gender seperti yang dilakukan oleh Bush ternyata cukup berhasil. Ketika kampanye di Negara Bagian Ohio, Bush mengangkat isu “nilai-nilai keluarga” dan “penjagaan pernikahan” bertentangan dengan aspirasi kalangan liberal yang mempromosikan hak pernikahan sejenis dan aborsi. Kampanye ini mendapat simpati dari para pemilih Kristen fundamentalis.

Akan tetapi, menurut Fraser, kampanye “nilai-nilai keluarga” Bush sesungguhnya bertentangan dengan fakta yang dihadapi oleh kalangan keluarga kelas pekerja yang semakin kesulitan menghadapi kebijakan neoliberal Bush. Sementara pajak bagi perusahaan dan orang-orang kaya direduksi, proteksi bagi konsumen dan program-program kesejahteraan justru dihilangkan. Kebijakan neoliberal Bush tentu saja memberatkan para pekerja berpenghasilan rendah, padahal beban hidup mereka semakin bertambah. Pertanyaannya, mengapa orang Amerika mudah sekali dimanipulasi oleh kampanye Bush tersebut? Dengan mengutip beberapa penelitian terkait isu itu, Fraser berpendapat bahwa pandangan Kanan tersebut berhasil menarik simpati para perempuan biasa terutama dari kalangan religius dan kelas pekerja. Bagi dua kalangan ini, feminisme dibayangkan adalah elit profesional dan humanis sekuler. Gagasan feminis tidak terlalu menarik minat mereka.

Mengutip analisis Gallagher, kontradiksi di kalangan perempuan Kristen evangelis di Amerika Serikat sangat tampak.⁷⁹ Pada satu sisi mereka merengkuh ideologi konservatif yang menekankan peranan perempuan di wilayah domestik, tetapi pada saat yang sama mereka aktif di pasaran kerja dan relatif berdaya dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Fraser, kontradiksi ini bisa dimengerti dengan melihat keberhasilan kampanye evangelisme yang mengimposisikan kesan bahwa Amerika Serikat menuju suatu jenis masyarakat baru yang disebut “masyarakat tidak aman” (*the insecurity society*) yang merupakan pelanjut dari “masyarakat sejahtera” (*the welfare society*). Kenyataannya masyarakat yang tidak aman justru melembagakan perasaan tidak aman di masyarakat. Mereka membangun kesan bahwa seolah-olah ada ancaman terhadap masyarakat baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Akan tetapi, dalam analisis Fraser, evangelisme tidak menawarkan perlindungan. Kepada masyarakat, evangelisme menyerukan “*You are a sinner, you are going to fail, you may lose your job, you may drink too much, you may have an affair, your husband may leave you, your children may use drugs. But that’s okay. God still loves you, and your church still accept you*”.⁸⁰ Dalam bahasa Foucault, kata Fraser, evangelisme adalah suatu teknologi “kepedulian diri” yang cocok dengan neoliberalisme, meski padahal neoliberalisme justru menyebabkan ketidakamanan. Rupanya banyak perempuan kelas

⁷⁹ Sally K. Gallagher, *Evangelical Identity and Gendered Family Life* (New Jersey: Rutgers University Press, 2003)

⁸⁰ Dikutip dalam Fraser, *Scales of Justice*, hlm. 111.

pekerja di Amerika Serikat mendapat sesuatu dari ideologi ini, sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari feminisme. Feminisme gagal memahami gejala dan tidak mempunyai resep praktis yang bisa ditawarkan kepada mereka.

Feminisme dan Krisis Neoliberal

Berbagai krisis yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini menunjukkan sifat dasar dan kontradiksi kapitalisme.⁸¹ Di bidang keuangan, krisis hipotek perumahan di AS pada tahun 2008 menunjukkan betapa rentannya fondasi ekonomi neoliberal. Krisis keuangan yang lebih serius melanda beberapa negara Eropa, seperti Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol, yang pada tingkat regional mengakibatkan legitimasi dan masa depan Uni Eropa (UE) dipertanyakan. Di beberapa negara Asia, krisis keuangan bahkan terjadi lebih awal, yaitu sejak akhir 1990-an, yang menyebabkan kerontokan ekonomi dan kemudian politik negara-negara tersebut.

Krisis tersebut sangat terkait dengan globalisasi.⁸² Oleh karena itu, Nancy Fraser mengusulkan agar gerakan feminis memikirkan ulang bingkai politik perjuangannya yang terbatas pada kerangka negara-bangsa. Feminisme, tulisnya, “membutuhkan problematisasi pembingkai ulang tentang keadilan yang tidak tepat dalam negara-negara yang mapan”.⁸³ Fraser menyadari bahwa pokok persoalannya terletak pada bingkai gerakan feminis itu sendiri. Jika pada masa sebelumnya bingkai feminisme adalah negara-bangsa, maka sekarang dia menyarankan kalangan feminis untuk melihat interkoneksi lokal-global secara lebih intens. Baginya, negara-bangsa yang selama ini menjadi bingkai feminisme kehilangan relevansinya ketika menghadapi sejumlah persoalan ketidakadilan yang bersifat transnasional. Fraser menyebut pemanasan global, penyebaran HIV-AIDS, terorisme internasional, dan unilateralisme negara-negara adikuasa sebagai contoh masalah yang mendesak untuk dijawab oleh feminisme. Dihadapkan pada masalah-masalah tersebut, feminis ditantang untuk merumuskan ulang bingkai perjuangannya untuk menata hubungan di antara ketidakadilan ekonomi dan kultural.⁸⁴

Dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan ambivalensi gerakan feminis menghadapi krisis neoliberal, Fraser berpaling kepada Karl Polanyi. Dari pemikir ini dia kemudian merumuskan strategi yang seharusnya dirumuskan oleh feminis dalam mengatasi ambivalensinya. Menurut Fraser, ambivalensi gerakan feminis kontemporer persis mengikuti dilema “proteksi” versus “marketisasi” sebagaimana dikemukakan oleh Polanyi dalam *The Great Transformation*.⁸⁵ Dalam buku yang terbit pada tahun 1944 itu, Polanyi menjelaskan rentetan krisis kapitalisme yang memuncak pada Depresi 1930. Bagi Fraser, Polanyi ini menarik karena menjelaskan krisis kapitalisme bukan terutama sebagai gangguan ekonomi dalam arti sempit, tetapi lebih tentang komunitas yang terpecah, solidaritas yang terkoyak, serta alam yang terampas. Akar permasalahannya tidak hanya tertanam dalam kontradiksi intra-ekonomi, tetapi lebih merupakan pergeseran di antara ekonomi vis-a-vis masyarakat. Berbeda dengan era sebelumnya ketika pasar tertanam dalam lembaga sosial dan tunduk pada norma moral serta etik, para pendukung pasar swatata atau “pasar yang mengatur dirinya sendiri” (*self regulating market*) membalikinya dengan menempatkan moral dan etika masyarakat di bawah pasar. Dengan kata lain, Polanyi berhasil menunjukkan bagaimana tenaga kerja, tanah, dan uang dijadikan komoditas layaknya komoditas yang biasa dipertukarkan di pasar.⁸⁶

Lebih lanjut Fraser mengatakan bahwa penjelasan Polanyi adalah catatan penting bagi feminisme gelombang kedua yang selalu menekankan interaksi antara faktor produksi ekonomi dan

⁸¹ Gerard Dumenil dan Dominique Levy, “The Nature and Contradictions of Neoliberalism”, *Socialist Register*, Vol. 38, 2002.

⁸² Fraser, *Scales of Justice*, hlm. 12

⁸³ Fraser, *Scales of Justice*, 114.

⁸⁴ Fraser, *Scales of Justice*, hlm. 113-114.

⁸⁵ Karl Polanyi, *The Great Transformation* (Boston: Beacon Press, 2001 [1944])

⁸⁶ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 228

reproduksi sosial dalam dinamika historis kapitalisme. Dampak terburuk dari neoliberalisme bukan hanya meningkatnya ketimpangan ekonomi, tetapi juga “krisis kepedulian” dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan.⁸⁷ Gejala fundamentalisme agama dan etnis adalah salah satu contoh krisis ini. Sementara rasa-merasa dan integrasi sosial dalam suatu masyarakat semakin sulit dicapai, penguatan politik identitas primordial justru semakin menguat. Dua sisi gejala masyarakat kontemporer ini adalah realitas yang menantang gerakan feminis di era krisis neoliberal. Bahkan, menurut Fraser, reproduksi sosial menempati posisi sentral dalam pemikiran Polanyi. Memang dia sendiri tidak menggunakan istilah itu. Namun dalam pandangannya mengenai krisis, disintegrasi ikatan sosial tidak kalah penting untuk daripada penghancuran nilai-nilai ekonomi. Keduanya berkait kelindan. Melalui Polanyi, Fraser berpendapat bahwa krisis kapitalisme ini sebagian besarnya adalah krisis sosial, yaitu marketisasi yang terlepas dari masyarakat sehingga membahayakan kapasitas manusia untuk menciptakan dan memelihara ikatan sosial. Karena tautan antara reproduksi sosial dan krisis kapitalis ini, pemikiran Polanyi bergema dengan kerja feminis akhir-akhir ini mengenai “penipisan sosial” dan “krisis kepedulian” yang secara prinsipil kerangkanya mampu merangkul banyak kekhawatiran feminis.⁸⁸

Kesimpulannya, kata Fraser, tujuan feminisme bukan hanya membebaskan perempuan dari hierarki gender, tetapi juga menyadarkan bahwa mereka berada di medan sosial yang juga dihuni oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, berbeda dengan Polanyi yang melihat pasar dan masyarakat secara diametral, Fraser lebih memahami keduanya secara relasional. Emansipasi justru terletak dalam hubungan di antara keduanya yang kerap diwarnai ambivalensi. Feminisme mau tidak mau harus menghidupi ambivalensi itu sambil mengantisipasi efek yang tidak diinginkan, selain terus menerus melakukan refleksi politik kolektif bagi kemungkinan terbaik mengatasi itu.⁸⁹

Jika diturunkan ke dalam empat pokok kritik feminis sebelumnya, usaha untuk mengkombinasikan proteksi dan marketisasi diformulasikan oleh Fraser sebagai berikut. Pertama, anti-neoliberal dan anti-ekonomisme. Fraser berpendapat bahwa krisis neoliberal saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengaktifkan kembali janji emansipatoris feminisme gelombang kedua. Dengan mengadopsi tiga dimensi keadilan yang meliputi redistribusi, rekognisi, dan representasi secara seimbang, feminis bisa merumuskan suatu kritik yang lebih kuat dan tepat dengan menyambungkan ulang kritik feminisme dan kritik kapitalisme, dan juga reposisi feminisme di kalangan kiri.⁹⁰

Kedua, anti-neoliberal dan anti-androsentris. Seperti pada yang pertama, pada poin kedua ini Fraser berargumen bahwa krisis neoliberalisme menawarkan kesempatan untuk memutus hubungan palsu antara kritik upah keluarga dan kapitalisme. Dengan memperbarui kritik androsentrisme, feminisme mungkin bisa menguatkan suatu bentuk kehidupan yang selama ini memisahkan kerja upahan dan kegiatan non-upahan, seperti kerja kepengasuhan. Bagaimanapun sekarang kegiatan tersebut dikerjakan sebagian oleh perempuan, sehingga kegiatan tersebut harus menjadi komponen kehidupan yang baik bagi semua orang.⁹¹

Ketiga, anti-neoliberal dan anti-etatisme. Fraser berpandangan bahwa krisis neoliberal juga memberikan peluang bagi feminisme untuk memisahkan hubungan palsu antara kritik terhadap etatisme dan marketisasi. Dengan membangun kembali demokrasi partisipatoris, feminisme bisa membangun suatu organisasi kekuatan politik baru yang menempatkan manajerialisme birokratis di bawah penguatan kewarganegaraan. Poinnya adalah bukan untuk menghilangkan, tetapi justru menguatkan kekuasaan publik. Dalam hal ini, demokrasi dibutuhkan untuk menumbuhkan partisipasi

⁸⁷ Nancy Fraser, “Contradictions of Capital and Care”, *New Left Review*, No. 100, Juli 2016.

⁸⁸ Fraser, *Scales of Justice*, hlm. 113-114.

⁸⁹ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 241

⁹⁰ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 225-226

⁹¹ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 225-226

yang setara dengan menggunakan politik untuk menjinakkan pasar dan untuk mengarahkan masyarakat menuju keadilan.⁹²

Keempat, anti-neoliberalisme dan pasca-Westphalianisme. Fraser beranggapan bahwa krisis neoliberalisme merupakan kesempatan bagi para feminis untuk merumuskan ulang pandangan ambivalen mereka mengenai kerangka Westphalian. Dalam konteks hari ini, kapasitas publik untuk merespons kapitalisme tidak bisa dibatasi oleh negara teritorial. Sekarang juga adalah waktu yang tepat untuk memutus identifikasi yang eksklusif antara demokrasi dan komunitas politik yang terbatas. Bersama dengan kekuatan progresif lainnya, feminisme bisa membangun suatu tatanan politik pasca-Westphalian yang bersifat multi-lingkup dan yang bisa menjangkau semua poros.⁹³

Penutup

Tulisan ini telah memaparkan kancah intelektual Fraser dan resignifikasi kritik feminisme gelombang kedua oleh kapitalisme liberal. Pada bagian awal, kompleksitas gerakan feminis dikemukakan beserta tempat Fraser di dalamnya. Bertolak dari pengalamannya sebagai mahasiswa radikal yang tergabung dengan gerakan kiri baru tahun 1960-an, Fraser kemudian terlibat perdebatan akademik yang mencoba melihat arah baru dari relasi antara feminisme, teori kritis, dan postmodernisme/post-strukturalisme di tahun 1980-an. Menurutnya, terutama pemikiran Habermas dan Foucault bisa dikombinasikan oleh para feminis agar mereka lebih mampu menganalisis wacana kekuasaan dan merumuskan suatu prinsip normatif yang memandu jalannya perjuangan sosial. Dari arah teori kritis mazhab Frankfurt, posisi Fraser sebagai bagian dari generasi ketiga berusaha memberi warna berbeda dibanding para pendahulunya. Generasi ketiga teori kritis mazhab Frankfurt dicirikan salah satunya dengan keterlibatan intelektual yang lebih intensif dengan isu-isu politik rekognisi, termasuk tentu saja gender. Yang khas dari Fraser adalah usahanya untuk tetap mengkoneksikan politik rekognisi dan kritik kapitalisme.

Pada bagian berikutnya, pembahasan diarahkan pada feminisme gelombang kedua yang berkembang sejak dekade 1960-an dan kritik yang mereka ajukan terhadap situasi zamannya. Fraser merumuskan empat sasaran kritik feminisme itu, yaitu ekonomisme, androsentrisme, etatisme, dan Westphalianisme. Empat hal yang mengemuka dalam praktik kapitalisme negara yang eksis hingga dekade 1980-an ini dinilai bermasalah dan bertentangan dengan cita-cita feminisme. Keempatnya mempunyai kecenderungan menindas perempuan. Keempatnya adalah sumber masalah ketidakadilan gender.

Akan tetapi, empat kritik yang diajukan feminisme itu kehilangan dayanya ketika kapitalisme negara berubah menjadi neoliberalisme. Perubahan yang disituasikan oleh kolapsnya sosialisme ini membuat empat kritik feminis tersebut justru diambil alih oleh neoliberalisme untuk melegitimasi dirinya. Hal ini tidak lepas dari sifat dasar kapitalisme sendiri yang sangat lentur, sehingga kritik terhadapnya bisa digunakan sedemikian rupa untuk memodifikasi dirinya. Pembahasan Fraser mengenai perkara pengambilalihan kritik feminisme oleh kapitalisme ini merupakan temuan penting yang sangat signifikan artinya dalam perdebatan di kalangan feminis sendiri. Secara meyakinkan dia memperlihatkan dilema-dilema yang dihadapi feminisme pada periode pasca-sosialisme ini khususnya di negara-negara Barat yang menjadi objek utama perhatiannya.

Belakangan neoliberalisme mengalami krisis. Namun alih-alih melihatnya secara pesimis, Fraser berpendapat bahwa krisis neoliberal yang terjadi sekarang ini adalah peluang bagi feminisme untuk mereaktualisasi janji-janji emansipatorisnya. Oleh karena itu, kaum feminis harus mereformulasi empat kritik yang telah diajukannya sejak era 1960-an itu agar kena dengan situasi saat ini. Untuk itu, pemahaman yang tepat mengenai situasi yang dihadapi oleh feminis mutlak diperlukan.

⁹² Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 225-226

⁹³ Fraser, *Fortunes of Feminism*, hlm. 225-226.

Namun oleh karena itu pula kritik feminisme membutuhkan implementasi yang beragam, strategi yang berlainan, tergantung pada konteks spesifik yang dihadapinya.

Daftar Rujukan

- Agger, Ben, *Critical Social Theories*, New York: Oxford University Press, 2013.
- Allen, Amy, "Critical Theory and Feminism" dalam Axel Honneth, Espen Hammer, dan Peter E. Gordon (ed.), *The Routledge Companion to the Frankfurt School*, New York/Oxon: Routledge, 2019.
- Allen, Amy, "Third Generation Critical Theory: Benhabib, Fraser, and Honneth", dalam Rosi Braidotti (ed.), *The History of Continental Philosophy*, Vol. 7, 2010.
- Arruzza, Cinzia, Tithi Bhattacharya, dan Nancy Fraser, *Feminism for 99 %: A Manifesto*, London/New York, 2019.
- Azmanova, Alben, "Crisis? Capitalism is Doing Very Well. How is Critical Theory?", *Constellations*, Vol. 21, No. 3, 2014.
- Baehr, Amy R., "Liberal Feminism", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/feminism-liberal/>>.
- Barton, Carol, "Global Women's Movements at a Crossroads: Seeking Definition, New Alliances and Greater Impact", *Socialism and Democracy*, Vol. 18, No. 1, 2004.
- Basow, Susan A, "Androcentrism" dalam Judith Worell (ed.), *Encyclopedia Women & Gender*, San Diego: Academic Press, 2002.
- Benhabib, Seyla et. all., *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*, London/New York: Routledge, 1995
- Boltanski, Luc dan Eve Chiapello, *The New Spirit of Capitalism*, London/New York: Verso, 2005.
- Bryson, Valerie, *Feminist Political Theory*, New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Butler, Judith, "Contingent Foundation" dalam Seyla Benhabib, et. all., *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*, New York: Routledge, 1994.
- Dumenil, Gerard dan Dominique Levy, "The Nature and Contradictions of Neoliberalism", *Socialist Register*, Vol. 38, 2002.
- Eisenstein, Hester, "A Dangerous Liaison? Feminism and Corporate Globalization", *Science & Society*, Vol. 69, No. 3, Juli, 2005.
- Fraser, Nancy, "Contradictions of Capital and Care", *New Left Review*, No. 100, Juli 2016.
- Fraser, Nancy, "How feminism become capitalism's handmaiden—and how to reclaim it", <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal>, diakses 10 Maret 2021.
- Fraser, Nancy, "Multiculturalism and Gender Equity: The U.S. "Difference" Debates Revisited", *Constellations*, Volume 3, No 1, 1996.

Fraser, Nancy, "Pragmatism, Feminism, and the Linguistic Turn",

Fraser, Nancy, "The End of Progressive Neoliberalism", https://www.dissentmagazine.org/online_articles/progressive-neoliberalism-reactionary-populism-nancy-fraser, diakses 2 Mei 2020.

Fraser, Nancy, *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*, London/New York: Verso, 2013.

Fraser, Nancy, *Justice Interruptus: Critical Reflection on "Postsocialist" Conditions*, London: Routledge, 1997.

Fraser, Nancy, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, New York: Columbia University Press, 2010.

Fraser, Nancy, *The Old Is Dying and the New Cannot Born*, London/New York: Routledge, 2019.

Fraser, Nancy, *Unruly Practice: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory*, The Minesota University Press, 1989.

Gallagher, Sally K., *Evangelical Identity and Gendered Family Life*, New Jersey: Rutgers University Press, 2003.

Heidi Hartmann, "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards A More Progressive Union", Lydia Sargent (ed.), *Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminsm*, Montreal: Black Rose Books, 1981.

Harvey, David, *Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press, 2007.

Hodgson-Wright, Stephanie, "Feminisme Periode Awal", Sarah Gamble (ed), *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme*, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

<https://thebrooklyninstitute.com/items/courses/new-york/feminism-frankfurt-school/>, diakses 10 Maret 2021.

Jaggar, Alison M., *Feminist Politics and Human Nature*, New Jersey: Rowman & Allanheld, 1983.

Jayasuriya, Kanishka, *Statecraft, Welfare, and the Politics of Inclusion*, New York: Palgrave Macmillan, 2006.

Magnis-Suseno, Franz, *Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Marcuse, Herbert, *One Dimensional Man*, New York: Routledge, 2007 [1964].

Meehan, Johanna, *Feminist Read Habermas: Gendering the Subject of Discourse*, New York/London: Routledge, 1995.

Mortham, Simon Morgan, *The Derrida Dictionary*, New York: Continuum, 2010.

Nickel, Patricia Mooney (ed.), *North American Critical Theory after Postmodernism: Contemporary Dialogues*, New York: PalgraveMacmillan, 2012.

Polanyi, Karl, *The Great Transformation*, Boston: Beacon Press, 2001 [1944].

- Pollock, Frederick, "State Capitalism: Its Possibilities and Limitations" dalam Andrew Arato dan Eike Gebhardt (eds.), *The Essential Frankfurt School Reader*, London: Continuum, 1982.
- Rottenberg, Catherine, *The Rise of Neoliberal Feminism*, New York: Oxford University Press, 2018.
- Sandberg, Sheryl, *Lean In: Women, Work, and the Will to Lead*, New York: Alfred A. Knopf, 2013.
- Sanders, Valerie, "Gerakan Feminisme Gelombang Pertama" Sarah Gamble (ed.), *Pengantar Memahami Feminisme & Postfeminisme*, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Sargent, Lydia, "New Left and Men: The Honeymoon is Over", Lydia Sargent (ed.), *Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism*, Montreal: Black Rose Books, 1981.
- Thong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005